

KEWARGANEGARAAN

Volume 18 : Nomor 01, Juni 2012

Perspektif Profesional Kinerja Guru
Bungaran Butar-Butar

Analisis Muatan Materi Pendidikan Agama Islam
dan Pengaruhnya Terhadap Akhlak Siswa SMA di Padang Sidempuan
Hapni Laila Siregar

Penerapan Model Pembelajaran Portofolio Dalam Pembelajaran IPS di SD
Risma Sitohang

Peningkatan Mutu Pembelajaran Melalui Pendekatan Inkuiri
Pada Mata Kuliah Konsep Dasar IPA di SD
Nurhairani

Pilkada dan Kelemahan Negara
Budi Ali Mukmin Sarumpaet

Responsivitas Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan publik
Februati Trimurni

Perilaku Memilih Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009
di Desa Parsosoran Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara
Halking dan Ronauli Lubis

Politik Pembangunan
Studi Kasus : Penanaman Modal Asing, Studi Pembangunan Pabrik dan Perkebunan
Kelapa Sawit di Sumatera Utara dalam Perspektif Modernisasi
Ramsul Nababan

Diterbitkan oleh :
Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
Fakultas Ilmu Sosial - Universitas Negeri Medan

ISSN 1693 – 7287

JURNAL KEWARGANEGARAAN

Penerbit

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

Pembina

Rektor Universitas Negeri Medan
Dekan FIS Unimed

Penanggung Jawab

Ketua Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Dewan Penyunting Pakar

Djanius Djamin, Prof. Dr. (Universitas Negeri Medan, Medan)
Abdul Muin Sibuea, Prof. Dr. (Universitas Negeri Medan, Medan)
Idrus Affandi, Prof. Dr. (Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung)
Ridwan A. Sani, Dr. (Universitas Negeri Medan, Medan)
Warsono, Prof. Dr. (Universitas Negeri Surabaya, Surabaya)

Ketua Penyunting

Drs. Buha Simamora, SH., MH

Pelaksana Penyunting

Drs. Suady Husein, SH., MS

Drs. Liber Siagian, M.Si

Dra. Yusna Melianti, MH

Drs. Halking, M.Si

Ramsul Nababan, SH

Sekretaris Penyunting

Parlaungan Gabriel Siahaan, SH., M.Hum

Alamat Redaksi :

Jurusan PP-Kn FIS UNIMED

Jl. Williém Iskandar Pasar V Medan K. Pos. 20221

Telp (061) 6625973 – Fak (061) – 6614002

E-mail PPKn@Plasa.com

Jurnal Kewarganegaraan : terbit dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Nopember. Penyunting mengundang para akademisi, guru dan peminat kajian kewarganegaraan untuk mengirim naskah, baik dalam bentuk artikel ilmiah maupun hasil penelitian tentang Pendidikan Kewarganegaraan dari kategori Tajuk Rencana Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, Analisis Hukum dan Wacana Demokrasi dan politik. Naskah yang dikirim agar mengikuti pedoman penulisan “Jurnal Kewarganegaraan”.

Opini yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi penyunting

Pengantar Redaksiiii

Tajuk Rencana Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran

	Perspektif Profesional Kinerja Guru Bungaran Butar-Butar.....	1
	Analisis Muatan Materi Pendidikan Agama Islam dan Pengaruhnya Terhadap Akhlak Siswa SMA di Padang Sidempuan Hapni Laila Siregar.....	18
	Penerapan Model Pembelajaran Portofolio Dalam Pembelajaran IPS di SD Risma Sitohang.....	36
	Peningkatan Mutu Pembelajaran Melalui Pendekatan Inkuiri Pada Mata Kuliah Konsep Dasar IPA di SD Nurhairani.....	48

Wacana Demokrasi dan Politik

	Pilkada dan Kelemahan Negara Budi Ali Mukmin Sarumpaet.....	70
	Responsivitas Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Februati Trimurni.....	101
	Perilaku Memilih Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 di Desa Parsosoran Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara Halking dan Ronauli Lubis	124
	Politik Pembangunan Studi Kasus : Penanaman Modal Asing, Studi Pembangunan Pabrik dan Perkebunan Kelapa Sawit di Sumatera Utara Dalam Perspektif Modernisasi Ramsul Nababan.....	152

Pengantar

Redaksi

Jurnal Kewarganegaraan setiap diterbitkan mengacu kepada tiga kategori, yaitu Tajuk rencana Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, Analisis Hukum dan Wacana Demokrasi dan politik. Dalam setiap terbit *Jurnal Kewarganegaraan* memuat tema sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Dengan diterbitkannya *Jurnal Kewarganegaraan* Volume 18 Nomor 01 Juni 2012 menandakan bahwa "*Jurnal Kewarganegaraan*" Jurusan PP-Kn Fakultas Ilmu Sosial - Unimed telah terbit sebanyak 18 kali, dan selalu rutin menerbitkan jurnal setiap tahun dua kali yaitu pada bulan Juni dan Nopember.

Pada terbitan kali ini menampilkan delapan tulisan dan karya ilmiah yang menitikberatkan pada persoalan Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, Demokrasi dan Politik.

Rubrik "Tajuk Rencana Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran" yang membahas tentang *Perspektif Profesional Kinerja Guru* yang diangkat oleh **Bungaran Butar-Butar** secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Guru adalah figur manusia sumber yang menempati posisi dan memegang peran penting dalam pendidikan. Ketika semua orang mempersoalkan masalah dunia pendidikan, figur guru mesti terlibat dalam agenda pembicaraan terutama yang menyangkut persoalan pendidikan formal di sekolah. Pendidik atau guru merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. **Hapni Laila Siregar** membahas tentang *Analisis Muatan Materi Pendidikan Agama Islam di SMA*, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Agama sangat berperan dalam memberikan penguatan dan pengembangan potensi spiritual peserta didik, khususnya dalam memberikan landasan etik, moral dan akhlak mulia. Pada tulisan ini bertujuan untuk mengetahui materi kurikulum PAI dan bagaimana pengaruhnya terhadap moral siswa SMA di Padang Sidempuan. Dalam kurikulum Pendidikan Agama

Islam SMA ada lima aspek materi, yaitu: Al-Quran, keimanan, akhlak, fiqih/ ibadah, dan tarikh. Dalam materi akhlak dibahas beberapa akhlak mahmudah dan madzmumah yang berhubungan dengan Allah SWT, keluarga, diri sendiri dan masyarakat.

Risma Sitohang membahas tentang *Penerapan Model Pembelajaran Portofolio Dalam Pembelajaran IPS di SD*, dapat disimpulkan bahwa Ilmu pengetahuan Sosial (IPS) adalah salah satu mata pelajaran yang diberikan di SD dan terdiri dari berbagai cabang ilmu-ilmu Sosial seperti Sosiologi, Antropologi Budaya, Psikologi sosial, Sejarah, Geografi, Ekonomi, dan Ilmu Politik. Tujuan IPS menuntut agar siswa menunjukkan ketrampilan sosial, sikap yang baik, kreatif, dan tanggung jawab. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah dalam pembelajaran IPS adalah dengan menggunakan model pembelajaran portopolio, dimana siswa dituntut untuk aktif, kreatif, partisipasi dan bertanggung jawab selama proses belajar mengajar berlangsung.

Sedangkan **Nurhairani** membahas tentang *Peningkatan Mutu Pembelajaran Melalui Pendekatan Inkuiri Pada Mata Kuliah Konsep Dasar IPA SD*, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa mata pelajaran IPA merupakan salah satu mata pelajaran inti yang harus diajarkan di tingkat SD. Oleh sebab itu, setiap mahasiswa di PGSD dituntut mempunyai kompetensi dan pemahaman yang cukup tentang konsep dasar IPA untuk sekolah dasar sebagai bekal bagi mahasiswa sebagai calon guru yang profesional. Untuk mencapai kompetensi yang diharapkan dalam pembelajaran konsep dasar IPA, pendekatan *inkuiri* merupakan salah satu pendekatan yang akan mencapai tujuan dari pembelajaran konsep dasar IPA itu sendiri dimana mahasiswa sebagai calon guru di sekolah dasar memiliki kemampuan mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mengembangkan rasa ingin tahu, dan memiliki kompetensi yang cukup tentang konsep dasar IPA sekolah dasar.

Sedangkan rubrik “Wacana Demokrasi dan Politik” yang di tulis oleh **Budi Ali Mukmin Sarumpaet**, mengangkat Issu yang berkaitan dengan demokrasi dan politik tentang Pilkada dan Kelemahan Negara, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa

Political Goods adalah sebuah pelayanan dari negara untuk memfasilitasi apa yang sudah menjadi kebutuhan masyarakatnya. Pilkada merupakan sebuah even dimana negara juga harus mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap penyelenggaraannya sekaligus bertanggung jawab atas efektifitas dari hasil pilkada tersebut. Akan tetapi dari berbagai permasalahan-permasalahan yang sering terjadi baik yang menimbulkan konflik vertikal maupun konflik horizontal sering melemahkan posisi dari negara selaku pengambilan kebijakan. Ketika negara mempunyai pola yang sistematis untuk menyediakan pelayanan bagi publiknya, akan tetapi tidak mampu untuk mengelolanya, maka negara tersebut bisa dikatakan ke dalam label negara lemah (*weak state*).

Februati Trimurni, membahas tentang *Responsivitas Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik*, yang dapat disimpulkan bahwa *Responsivitas* dalam pelayanan publik sangat diperlukan sebagai salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan untuk memenuhi tanggung jawab pemerintah terhadap pelayanan kepada masyarakat. Halking dan Ronauli Lubis membahas tentang *Perilaku Masyarakat Dalam Pemilihan Umum*, yang dapat disimpulkan bahwa Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu instrumen terpenting dalam sistem politik-demokratik modern. Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik yang terbuka dan bersifat massal, sehingga diharapkan dapat berfungsi dalam proses pendewasaan dan pencerdasan pemahaman politik masyarakat. Melalui pemilu akan terwujud suatu infrastruktur dan mekanisme demokrasi serta membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi. Masyarakat diharapkan pula dapat memahami bahwa fungsi pemilu itu adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintah, dan pergantian pemerintahan secara teratur. Partisipasi warga negara dapat dilihat melalui perilaku politiknya. Perilaku politik itu dapat dilihat dari berbagai jenis yaitu melalui partai politik, kampanye, pemberian suara dan lain-lain.

Sedangkan Ramsul Nababan membahas tentang *Politik Pembangunan*, yang dapat disimpulkan bahwa Konsep Pembangunan merupakan salah konsep menuju modernisasi. Konsep ini pertama kali digulirkan oleh Truman Presiden Amerika Serikat yang tertuang

ke dalam sebuah doktrin yang bermula dari masa *entlightment* dimana pada masa itu pembangunan diarahkan kepada sebuah *Development as Progress* yang menyangkut sebuah *Rationality, Properiority* dan *Liberty*. Bagi Truman pembangunan dalam perspektif modernisasi akan menimbulkan dua aspek. **Pertama** sebagai *Means* dimana sebagai sarana perubahan sosial dan **Kedua** adalah *Ends* dimana pembangunan sebagai tujuan akhir. Secara garis besarnya pembangunan dari perspektif modernisasi dikatakan sebagai perubahan dari tradisonal ke arah yang modernisasi. Proses pertumbuhan akan berjalan secara alamiah, dan untuk mencapai tahapan ke modernisasi maka harus membutuhkan adanya investasi dalam pembangunan.

Penyunting senantiasa mengharapkan kepada para akademisi, guru dan peminat kajian dalam bidang pendidikan dan kewarganegaraan, hukum dan sosial politik kenegaraan untuk berpartisipasi mengirimkan naskah, baik dalam bentuk artikel ilmiah maupun hasil penelitian dengan kategori Tajuk rencana Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, Analisis Hukum dan Wacana Demokrasi dan politik.

Harapan kami, Jurnal Kewarganegaraan ini dapat menjadi bacaan ilmiah bagi para penulis dan pembaca pada umumnya, untuk menambah wawasan tentang pendidikan dan kewarganegaraan. Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada para penulis dan tim penyunting yang telah bekerja keras, sehingga Jurnal Kewarganegaraan ini dapat diterbitkan.

Redaksi



PILKADA DAN KELEMAHAN NEGARA

Oleh : Budi Ali Mukmin *

Abstract

Political Goods is a service from the state to facilitate the things that become the needs of the citizens. Pilkada is an event in which the state also has big responsibility toward both the process and the effectiveness of that pilkada results. But the problems which often occur and cause the vertical and horizontal conflicts, often weaken the position of the state as a policy maker. When the state has a systematic pattern to give the service to its public but unable to operate it, so that state can be labeled as a weak state.

Key Word : Pilkada, Political Goods, Weak state.

Indonesia is another case of weakness avoiding failure despite widespread insecurity.....and Indonesia, Columbia, Srilangka and Zimbabwe are but four among large for early twenty first nation-states at risk of failing (Robert I Rotberg)¹

PENDAHULUAN

Kutipan Rotberg di atas merupakan sebuah ungkapan untuk melabelkan sebuah kondisi negara-negara yang ada pada saat ini. Realita keadaan sebuah negara setidaknya akan menjadi *viwer* untuk melihat sejauh mana negara tersebut mampu untuk menyediakan *political goods* kepada masyarakatnya. Apa yang dikatakan oleh Robert I Rotberg pada kutipan di atas sebenarnya menarik untuk ditelusuri apakah negara ini sedang mengalami *weak state* atau apakah menuju kepada sebuah label *failed State*. Ada baiknya kalau kita menelisik lebih jauh seperti apa wajah bangsa ini jika dilihat dari beberapa pendekatan *governability*.

Pada masa Orde Baru, banyak para peneliti mengatakan bahwa bangsa Indonesia termasuk dalam kategori *strong State* (negara kuat).

*Budi Ali Mukmin Sarumpaet, S.IP., M.A. adalah Dosen Pada Jurusan PP-Kn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

¹ Robert I Rotberg "*Failed States, Collapsed States, Weak States: Cause and Indicators*", Sebuah Materi Perkuliahan Ilmu Politik UGM tahun 2007.

Indikator yang paling menguatkan argumen saat itu adalah bagaimana pertumbuhan perekonomian, stabilitas politik terjaga dan pembangunan infrastruktur maupun suprastruktur berjalan dengan baik, disusul dengan keberhasilan swasembada pangan dengan slogan replita pembangunan membawa bangsa ini, di bawah orde baru cukup disegani di kawasan negara-negara Asia, khususnya Asia Tenggara. Akan tetapi setelah reformasi tahun 1998 yang ditandai dengan lengsernya presiden Suharto, maka cara memandang/melabelkan Indonesia kini mulai beragam.

Perubahan rezim diikuti dengan perubahan sistem pemerintahan negara setidaknya telah membawa perubahan yang besar bagi perubahan geo-politik di Indonesia. Sebuah konsep sentralisasi yang dilakukan negara pada masa orde baru telah berganti dengan sistem desentralisasi dengan sebuah rangkaian pondasi demokrasi. Ternyata pondasi demokrasi yang membawa liberalisasi politik di negeri ini belum sepenuhnya kuat dalam sebuah simpul yang mampu memperbaiki keadaan setelah pasca reformasi bangsa ini belum menemukan obat yang mujarab untuk mengobati penyakit yang tampaknya sudah menjadi penyakit yang bersifat permanen. Amburadulnya sistem desentralisasi yang menimbulkan berbagai permasalahan baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dilanjutkan dengan munculnya konflik-konflik baik vertikal maupun horizontal disetiap daerah, dan munculnya arogansi diantara elit politik menjadi rentetan mimpi kelam terhadap perjalanan bangsa ini. Tak salah bila pengamat politik seperti T. Sidel mengatakan bahwa kondisi politik lokal di Indonesia merupakan sebuah perpaduan antara politik uang dan premanisme, sampai ditingkat terendah sampai tingkat pusat.

RISALAH WEAK STATE

Pemberian label *weak state* sebenarnya merupakan cara pandang yang telah lama populer untuk melihat negara-negara pasca perang dunia berakhir. Dahulu cara pandang ini lebih difokuskan kepada negara-negara Afrika yang mengalami ketertinggalan pasca masa kolonialisme. William Zartman mengatakan bahwa kebanyakan negara-negara Afrika seperti Zimbabwe, Srilangka, Chad, Nigeria, maupun negara kepulauan karibia yang lain seperti Haiti masih bergelut untuk memperebutkan kekuasaan antara sesama mereka yang memiliki beragam etnis, agama dan beragam kepentingan. Dari hal tersebut kemelut-kemelut yang menimbulkan adanya konflik tidak dapat dihindarkan, sehingga stabilitas pemerintahan yang diharapkan mampu memberikan *political goods* kepada masyarakatnya ternyata tidak dapat terpenuhi secara baik.

Sebuah majalah *The Washington Quarterly* tahun 2001² yang mempunyai perhatian yang sangat mendalam untuk melihat fenomena-fenomena dari negara-negara yang sedang mengalami krisis berkepanjangan. Merujuk dari hal tersebut setidaknya ada 191 negara yang ada di dunia masuk dalam kategori negara-negara gagal (*failed state*) ataupun negara yang sedang mengalami kehancuran, dan selebihnya banyak negara-negara yang mendapatkan label *weak state*. Dari beberapa kategorisasi yang diungkapkan tersebut maka ada tujuh negara yang sedang mengalami kegagalan, seperti Afganistan, Angola, Burundi, Republik Demokratik Congo, Liberia, Sierra Leone dan Sudan. Terdapat pula negara yang sama sekali hancur (*Collaps State*) yakni

² Perincian dari permasalahan yang diungkapkan dari Majalah *The Washington Quarterly* (Amerika), merilis negara-negara yang tidak mampu memberikan *political goods* terhadap rakyatnya. Sumber ini berasal dari www.polarhome.com.

Somalia.³ Sedangkan negara yang termasuk negara lemah adalah negara Columbia. Yang menjadi pertanyaan kita adalah dimana sekarang posisi Indonesia dilabelkan? Benarkah negara kita masih terbelenggu ke dalam area *weak state* ataukah sudah beralih ke *failed state*? Jika Robert I. Rotberg mengatakan negara Indonesia sedang dilabelkan ke dalam posisi *weak state*, dimana titik lemah dari sifat *weakness* yang menggerogoti negara ini? Dan faktor-faktor apa yang menyebabkan Indonesia berada di titik *weak state*?

Label *Strong States, Weak States, Failed States, Collaps States*, merupakan sebuah label terhadap sebuah negara untuk melihat sejauh mana negara tersebut mampu untuk menyediakan *Political Goods* yang terbagi ke dalam sebuah konsep *Governability*. *Governability* yang dimaksud adalah sebuah kapasitas atau kemampuan sebuah negara bangsa untuk mengelola maupun menyediakan barang-barang politik (*political goods*)⁴. Pratikno dan Cornelis Lay menggunakan beberapa indikator untuk melihat aspek *governability*. Ada beberapa indikator untuk melihat aspek-aspek *governability* tersebut yang dapat dilihat dalam beberapa aspek, seperti dalam penyediaan barang-barang politik, tata hukum sebagai standar perilaku yang meregulasi interaksi penduduk, terciptanya pelayanan kesehatan yang terjangkau, terciptanya pelayanan pendidikan yang terjangkau, penyediaan infrastruktur, sistem uang dan perbankan stabil, kesempatan ekonomi dan lingkungan bisnis yang kondusif, tersedianya ekonomi dan lingkungan bisnis yang kondusif, dan terciptanya pengawasan dan pengaturan lingkungan.

³ *Ibid*

⁴ Pratikno dan Cornelis lay "*Alternatif Terhadap Perspektif Pluralisme*" dalam sebuah diktat perkuliahan Politik Indonesia, 2007.

Robert I Rotberg adalah salah satu sosok yang mempunyai keseriusan untuk mengamati perkembangan-perkembangan negara-negara dunia ketiga, dan tak terkecuali pandangannya mengenai bangsa Indonesia. Dia mengatakan bahwa *weak state* pada dasarnya dapat dilihat dari kenyataan dimana negara tersebut kuat hanya secara kondisional, akan tetapi negara ini sebenarnya lemah yang disebabkan keburukan-keburukan atau ketidakmampuan secara internal, hal itu dapat dilihat dari hal tatakelola pemerintahan negara yang buruk, timbulnya korupsi yang berlebihan, terjadinya ancaman dari luar negeri ataupun munculnya pemberontakan dalam negeri.⁵ Jika kita sedikit bergeser dengan menggunakan pendekatan internasional maka *weak state* merupakan sebuah negara yang kurang memiliki kemampuan/kekuatan untuk melindungi kepentingan nasionalnya, tidak mampu memproteksi ancaman dari luar, tidak mampu menjaga teritorial wilayah, dan tidak mampu melindungi warga negaranya.⁶

Secara umumnya negara-negara yang terkategori memasuki fase-fase *weakness* ini adalah negara-negara yang memiliki keaneragaman suku, agama, atau adanya tekanan dari masyarakat yang meningkat ke permukaan yang menjelma sebagai konflik dan kemampuan suatu negara untuk menyediakan sarana-sarana *political goods* masih terasa kurang, bahkan nyaris tidak terlihat. Rotberg menjelaskan indikator untuk melihat sebuah negara itu lemah juga dapat dilihat dari beberapa hal, seperti dalam bidang politik dimana sebuah sistem pemerintahan yang tidak

⁵ Robert I Rotberg "The New Nature of Nation-State Failure" The Washington Quarterly, Vol. 25, 2002, hal. 25.

⁶ Background Notes On The Notion of Weak State as Employed In International Relations Studies, Overcoming State Weakness: An Agenda for State Reform eastern Europe Conference. Sumber didownload dari www.web.ceu.hu.com.

capable dalam melindungi rakyatnya, juga dalam segi ekonomi memiliki GNP yang di bawah rata-rata negara yang sedang berkembang. Jika kita tabulasikan ke dalam sebuah tabel maka kita dapat melihat seperti apa yang indikator dari sebuah negara yang dilabelkan ke dalam *weak state*. Lihat tabel berikut.

WEAK STATE	INDIKATOR
Dalam hal Politik	<ul style="list-style-type: none"> - Negara telah digerogoti oleh keburukan internal. - Kurangnya Manajemen dalam Pemerintahan. - Tingkat Korupsi yang Tinggi. - Hanya memenuhi sedikit tuntutan politik.
Dalam Aspek Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Pelanggaran Hukum - Bersifat Otokrasi.
Dalam hal Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - GDP perkapita sedang mengalami penurunan. - Pelayanan Publik (Prasarana) dalam melayani masyarakat tidak dipenuhi secara baik.
Dalam Hal Konflik	<ul style="list-style-type: none"> - Negara belum mempunyai good Managen konflik politics, baik tingkat pusat sampai tingkat daerah. - Munculnya kekerasan Internal biasanya bercirikan suku, agama, bahasa, dan terkadang disebabkan karena depresi dari masyarakat.

Sumber diolah dari : Robert I Rotberg, *The New Nature of Nation-State Failure* : *The Washington Quarterly*, Vol 25, 2002

Indikator yang digunakan Robert I Rotberg sebenarnya ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana keadaan negeri ini. Tulisan ini sebenarnya hendak melihat bagaimana lemahnya negara dalam penyediaan *political goods*. *Political goods* yang hendak menjadi sasaran penulis adalah bagaimana pelayanan negara terhadap publik khususnya dalam pilkada. Setiap momen-momen pilkada biasanya sering dihiasi dengan berbagai persoalan yang muncul yang dapat menyebabkan beberapa permasalahan yang sangat krusial. Yang perlu untuk dilihat adalah apakah persoalan ini disebabkan karena ketidakmampuan negara dalam menyediakan *political good* atau hanya ketidakmampuan negara dalam hal pengelolaannya.

PILKADA PADA MASA REZIM OTONOMI DAERAH

Konsep desentralisasi yang lahir dari embrio reformasi ternyata menyumbangkan segudang persoalan yang setidaknya menjadikan

bangsa mengidap sebuah penyakit yang serius. Desentralisasi yang berjalan di negeri ini justru dikatakan *by default*. Dikatakan *by default*, karena kebijakan-kebijakan untuk melakukan desentralisasi dipicu oleh keterpaksaan situasi, yang mengakibatkan pemerintah pusat melimpahkan kekuasaan dan kewenangan kepada pemerintah daerah.⁷ Hal senada juga dikatakan oleh Pratikno bahwa desentralisasi bukanlah yang final (*Persoalan Otonomi Daerah*). Kita dapat mencurigainya dimana desentralisasi sepertinya hanya sebagai obat penenang bagi ketidakpuasan setiap daerah selama masa rezim orde baru yang bersifat sentralistik. Pada saat itu keadaan politik sangat genting, banyak daerah yang ingin menuntut hak-haknya seperti Aceh, Riau, Papua, Kalimantan secara cepat. Setelah jatuhnya rezim orde baru maka ada kecenderungan bahwa daerah-daerah yang bergejolak ingin melepaskan diri dari NKRI mengikuti jejak Timur-Timur.

Permasalahan lain yang muncul adalah sistem otonomi daerah yang mengidentifikasikan bahwa negara ini sangat dekat dekat pelabelan *weak state* adalah dimana pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sebagai otoritas pembuat kebijakan ternyata tidak mampu memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat dan akhirnya menghasilkan sebuah persekongkolan antara elit-elit politik lokal untuk meraih keuntungan ekonomi.⁸ Maka dari itu kontrol pemerintah yang dinilai sangat lemah akan membawa indikasi yang jelas bahwa dalam melayani *political goods* terhadap rakyatnya terkesan sangat lemah. Ternyata otonomi daerah membawa gerbong-gerbong bagi

⁷ Ucu Martantanto "*Kemiskinan di Daerah, Potret Buram Desentralisasi*" Mandatory Politik Kesejahteraan di tanah Republik, hal. 51.

⁸ Ucu Martanto *Ibid*.

terbentuknya daerah-daerah baru atau dengan istilah yang sering dengarkan dengan sebutan pemekaran daerah.

Keluarnya UU NO. 22/1999 yang kemudian direvisi dengan UU NO. 32/2004 semakin melegitimasi bahwa bangsa ini memberikan ruang baru terhadap mekanisme hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pada Masa-masa desentralisasi sedang berjalan, kehadiran pilkada memberikan panorama tersendiri terhadap demokrasi di aras lokal. Ada beberapa daerah yang sukses melakukan pilkada, dan tak sedikit pula pilkada yang sering berdampak negatif, seperti munculnya konflik komunal, ataupun konflik yang mengarah kepada tindakan amuk massa. Pemahaman yang sempit terhadap pemaknaan desentralisasi yang mengusung isu-isu kedaerahan membuat pilkada taklepas dari beberapa persoalan. Secara khususnya penulis ingin melihat lemahnya negara dalam pilkada pada masa-masa transisi demokrasi yang dirangkai beberapa aspek.

PILKADA DAN BAYANG-BAYANG KELEMAHAN NEGARA

Jika mengikuti alur berfikir Cornelis Lay, maka untuk memahami perpolitikan di Indonesia dibagi ke dalam dua jarak pandang. *Pertama*, orang-orang selalu menekankan kepada pertanyaan mengenai seberapa plural bangsa ini sebagai suatu entitas politik yang nantinya akan menjadi watak dalam pengambilan keputusan. *Kedua* pusat kajian selama orde baru hampir sepenuhnya melihat Indonesia dari pusat.⁹ Apa yang menjadi pemaparan di atas sebenarnya dapat dilihat sebagai fenomena-fenomena yang menyebabkan bangsa ini terjerembab ke dalam lebel *weak state*. Kita tidak menutup mata, bahwa bangsa ini mengalami masa

⁹ Corbelis Lay "*Memahami Indonesia Dari Daerah*" dalam sebuah paper untuk mereview Buku Politik Lokal Indonesia, JIP-S2 PLOD, UGM. 2008.

transisi demokrasi telah menimbulkan polemik yang berkepanjangan, ironisnya polemik yang sering muncul justru di tingkat lokal, yang selama orde baru keberadaan etnis yang beragam, *multy* religius, sangat terabaikan. Sehingga keadaan ini akan menjadi *time bomb* yang setiap saat akan mudah meledak.

Dari beberapa persoalan yang selama ini mengindikasikan bahwa Indonesia dilebelkan dengan *weak state*, Francis Fukuyama yang disunting oleh Usman Pelly, mengatakan untuk melihat kondisi negara dengan sudut pandangan *governability* ini, maka dibutuhkan dua skope untuk melihat kapasitas tersebut. *Pertama* adalah dalam cakupan *Skpoe*, sedangkan yang *Kedua* termasuk ke dalam kekuatan/kapasitas (*strenght*). Marik kita mencoba menelisik lebih jauh bagaimana implikasinya dengan fakta yang terjadi di Indonesia.

Jika kita menggunakan konsep yang *pertama* (Schope), maka kita dapat melihat bahwa bangsa ini setelah reformasi tidak mempunyai schope yang jelas dimana wilayah-wilayah yang harus menjadi prioritas kebijakan dari negara telah terabaikan. Kalau kita komparasikan pada masa orde baru, maka seluruh cakupan schope yang meliputi seluruh aspek kehidupan rakyat diambil dikuasai oleh pemerintah pusat, ironisnya dengan SDM yang lemah, maka jalan dari aparat kepolisian maupun militer untuk masuk ke dalam teritorial publik sangat mudah, maka dari itu prinsip pemerintah pusat menjadi sentralistik dan cenderung refresif.¹⁰

Sepertinya keadaan di atas sangat berbanding terbalik dengan keadaan pasca jatuhnya rezim orde baru. Ketika keran-keran demokrasi

¹⁰ Usman Pelly "*Saran Fukuyama Untuk SBY dan Bush*", Harian Waspada, 29 Agustus 2007.

terbuka sebenarnya cakupan scope mulai jelas dimana letak cakupan yang harus diperbaiki yang selama orde baru telah diambil secara paksa. Akan tetapi kemampuan negara secara administratif sangat lemah, sehingga banyak menimbulkan tindakan-tindakan korupsi, hukum yang lemah, serta banyaknya kebijakan-kebijakan baru yang sering salah dalam praktiknya.

Sedangkan yang kedua, jika argumentasi Fukuyama mengatakan bahwa Kapasitas/Kekuatan *Small but Strenght* tampak hal itu tidak sepenuhnya terjadi di negeri ini. Dari segi kebijakan ataupun aturan-aturan baru seperti dengan terciptanya otonomi daerah ataupun dengan terciptanya Pilkada langsung di tingkat lokal setidaknya membuat runyam keadaan. Kapasitas negara tidak mumpuni untuk mengakomodasi apa yang menjadi kebutuhan rakyat, justru yang keadaan yang sering muncul adalah beragam konflik-konflik berbau etnis, agama dan beragam kepentingan baik elit lokal ataupun kelompok tertentu. Untuk kajian lebih lanjut adanya baiknya kalau kita melacak dimana saja yang menjadi titik rawan dari lemahnya negara.

Pemilihan Kepala Daerah Langsung merupakan salah satu instrumen untuk memperkuat proses demokrasi dalam otonomi daerah. Akan tetapi pilkada langsung bukanlah meninggalkan cerita-cerita baiknya saja. Pengalaman dari beberapa negara berkembang yang melakukan pilkada langsung justru menyebabkan daerah tersebut memperaktekkan sistem yang sangat jauh dari harapan, dan malah cenderung ke dalam *bad governance*. Dominasi yang sering terbangun antara elit politik lokal dan lemahnya aturan-aturan hukum dapat menyebabkan kooptasi sebuah kekuasaan yang dapat dilakukan oleh elit politik lokal tertentu, partai politik.

Dari berbagai cacatan yang ada sebanyak 323 pilkada yang diselenggarakan di setiap daerah Indonesia, diindikasikan bahwa pilkada yang telah digelar ternyata ada beberapa daerah yang belum menunjukkan signifikansi yang lebih dimana pemerintahan tersebut belum memberikan *political goods* terhadap rakyatnya. Ada kesan bahwa pemerintahan yang dihasilkan melalui proses pilkada hanya berjalan ditempat dan berjalan statis.

Hal ini menandakan bahwa pilkada masih banyak meninggalkan persoalan-persoalan baik dalam hal penyelenggaraan pilkada maupun dalam hasil pencapaian dalam pilkada. Idealnya proses pilkada akan memberikan sebuah input yang baik untuk menciptakan ruang demokrasi di aras lokal, sehingga feed back yang ditimbulkan adalah tersedianya pemerintahan yang mampu menyediakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dalam tulisan ini sebenarnya ingin melihat dimana saja letak dari kelamhan negara dalam pilkada.

1. Lemahnya Negara Dalam Penyelenggaraan Pilkada

Secara Harfiah maka Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah Langsung) mempunyai makna mengembalikan hak-hak dasar masyarakat di daerah dengan memberikan sebuah kewenangan yang utuh dalam proses rekrutmen politik lokal.¹¹ Lahirnya UU N0 32/2004 dan PP N0 6 2005 akhirnya melegitimasi bahwa secara hukum harus dilaksanakan yang menggunakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Keluarnya produk hukum menandakan bahwa bangsa Indonesia memasuki fase-fase liberalisasi politik dimana terciptanya sebuah

¹¹ Joko J Prihatmoko "*Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*" Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal. 21.

terbosan yang baru dalam tata cara berdemokrasi pasca jatuhnya rezim orde baru.

Politik masa transisi memang diwarnai oleh liberalisasi politik.¹² Jika liberalisasi mengawali transisi, maka kita dapat menempatkan pada titik awal *terminus ad quo* dimana titik fokus kita adalah penguasa otoriter yang selama ini telah memebelenggu hak-hak individual ataupun kelompok.¹³ Liberalisasi politik yang terlihat dalam masa transisi ini adalah dalam bidang Hak-hak Asasi Manusia, kebebasan berbicara memang telah diperlihatkan dengan jelas. Dalam konteks perpolitikan Indonesia, banyak sekali indikator yang dapat kita asumsikan bahwa liberalisasi politik telah terjadi di Indonesia. Semaraknya partai politik yang berdiri pasca jatuhnya Suharto, terciptanya kebebasan pers, dan berkurangnya peranan negara merupakan gambaran yang nyata untuk kita lihat, Otonomi daerah semakin menguatkan argumentasi tersebut, walaupun pada prakteknya otonomi daerah belum berjalan mulus setidaknya hal itu merupakan fase awal dalam proses liberalisasi politik.

Transisi demokrasi ditingkat lokal yang diawali pada masa reformasi setidaknya membawa dua Implikasi penting bagi pertumbuhan masyarakat sipil dan demokratisasi baik di aras nasional maupun lokal.¹⁴

Pertama, Pembukaan liberalisasi politik, yang antara lain ditandai dengan pembebasan para tahanan politik meluapnya kebebasan pers dan kebebasan bersuara, serta bangkitnya politik multi partai. *Kedua*,

¹² Afan Gaffar, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hal. 316.

¹³ Guillermo O'Donnell dan Philippe C Schmitter *"Transisi Menuju Demokrasi: Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian"*, Jakarta:LP3ES,1993. hal. 7.

¹⁴ Sutoro Eko Yunanto *"Pendalaman Demokrasi Lokal Melalui Masyarakat Sipil"* Sebuah Rancangan Penelitian diajukan untuk memenuhi persyaratan Lamaran Program Doktor program Ilmu Politik, UGM

meluasnya arus desentralisasi dan demokrasi ditingkat lokal. Desentralisasi yang membawa arus demokrasi lokal terus tumbuh secara cepat. Masyarakat sipil ikut bermain dalam iklim demokrasi lokal baik dalam arena demokrasi lokal maupun pengambilan keputusan daerah.

Jika dikaitkan dengan Logika yang dibangun oleh Guillermo dan Schumpeterian maka pilkada merupakan sebuah rentetan terwujudnya proses demokratis ditingkat lokal. Hal senada juga di katakan Larry Diamond, jika penguatan demokrasi sudah terjadi ditingkat lokal, sesungguhnya kita memasuki ke dalam sebuah tahap konsolidasi demokrasi.

Pada prinsipnya pilkada memiliki beberapa fungsi.¹⁵ *Pertama* idealnya pilkada mampu menghidupkan tatanan demokrasi di aras lokal. *Kedua*, pilkada langsung bertujuan untuk menata dan mengelola pemerintahan daerah atau yang disebut dengan *Local Democratic Governance*. *Ketiga*, Pilkada langsung diharapkan mampu mendorong bekerjanya insitusi-institusi politik lokal. Jika kita mengikuti aliran pemikiran yang tertera di atas, muncul pertanyaan bagi kita apakah apakah pilkada yang selama ini berjalan telah berjalan dengan baik? Apakah hadirnya negara mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat melalui pilkada?.

Gerakan masif pilkada (Pemilihan Kepala Daerah Langsung) yang diselenggarakan di setiap daerah disamping membuat konsolidasi demokrasi juga menegaskan akan terjadinya berbagai permasalahan. Konflik-konflik horisontalpun mulai sering menggapung permukaan yang disampaikan oleh berbagai kalangan.

¹⁵ Gregorius Sahdan "*Distorsi dan Paradoks Demokrasi dalam Pilkada*" dalam sebuah buku Demokrasi Lokal ala Pilkada, APMD Press, Yogyakarta, 2002, hal 249.

Bangsa Indonesia terkenal dengan sukses dalam penyelenggaraan pemilihan Umum maupun pemilihan kepala daerah secara langsung. Akan tetapi yang menjadi problema dalam penyelenggaraan setiap pemilu maupun pilkada selalu menguras uang negara yang sangat besar. Ironisnya *high cost* yang dikeluarkan untuk momen ini membutuhkan dana yang cukup besar dan menguras banyak uang negara, dan kalau dialokasikan untuk memberikan sebuah program, seperti pengentasan kemiskinan, mungkin saja dana tersebut mampu mengurangi beban negara. Sayangnya uang negara yang cukup besar untuk melakukan perhelatan pilkada belum tentu dibarengi dengan keberhasilan untuk meningkatkan kapasitas suatu daerah untuk memberikan *political goods* pada masyarakat.

Institusi-institusi seperti KPU, ataupun KPUD ternyata juga mengalami nasib yang serupa. KPU yang berada tingkat lokal sering menjadi bahan lampiasan ketika terjadinya konflik yang muncul ketika. Kompetensi KPUD sebagai pengejawantahan dari kaki tangan negara masih diragukan dalam penyelenggaraan Pilkada. Fakta yang terjadi dilapangan sering didapati bahwa KPUD justru saling berkonflik dengan DPRD misalnya mengenai pertanggung jawaban KPU atupun dengan BPS yang menyangkut masalah data pemilih.

Kaburnya aturan-aturan yang ditegakkan oleh KPUD disetiap pilkada semakin memperjelas bahwa pilkada yang berlangsung masih dalam keadaan yang rawan dengan bentuk permasalahan. Kendala yang sering terjadi yang ada di KPUD adalah masalah aturan yang berlakuk, kita tidak menutup mata bahwa kadang kala KPUD sangat mudah di Intervensi oleh berbagai kalangan seperti Partai Politik. Posisi yang

tentunya sangat sulit bagi KPUD untuk memberikan hukuman-hukuman tertentu jika terjadi kecurangan dalam pilkada.

Dari rentetan yang pilkada yang telah berjalan setidaknya ada beberapa pilkada yang bisa dikatakan belum mencapai titik yang memuaskan pada tahun 2008. Fenomena pilkada yang terjadi di Maluku Utara maupun di Nganjuk Jawa Timur sebenarnya mengindasikan bahwa posisi negara sangat lemah untuk memberikan *political good* ditingkat lokal. Fenomena yang terjadi di Maluku Utara telah terjadi penolakan masyarakat terhadap hasil penghitungan suara yang telah dikeluarkan oleh KPUD Malut. Indikasi awal yang menyebabkan bahwa penolakan tersebut didasarkan pada kecurangan seperti penggelembungan suara yang menyebabkan beberapa pendukung dari Armaiyn-Abdul Gani marah dan cenderung bertindak anarkis. Sebuah kejutan muncul dalam proses pilkada yang terjadi di Malut, dimana hasil pilkada telah mengeluarkan dua versi yang berberbeda.¹⁶ Versi pertama memenangkan KPUD memenangkan Thaib Armayn-Abdul Gani sedangkan versi yang kedua pasangan Gafur-Abdurrahim Fabanyo dikatakan menang yang hasil perhitungannya dilakukan oleh Plt KPUD Malut Muchlis Tapitapi. Disisi lain pihak DPRD Malut konsisten untuk tetap mensahkan pasangan Gafur-Fabanyo.

Pilkada Nganjuk akan menjadi kasus kedua yang setidaknya memberikan gambaran bagi kita ternyata pilkada yang diharapkan membuat demokrasi semakin solid ternyata semakin membuat posisi negara semakin lemah. Pada tanggal 12/3/2008 telah terjadi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh salah satu pendukung dari para kandidat

¹⁶ Suara Karya "Pemerintah Minta DPRD Ajukan Cagub terpilih" Jum'at 28 Maret 2008.

yang kecewa terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU kabupaten Nganjuk, dan menuduh para Panwaslu tidak becus dalam melaksanakan pengawasannya. Secara garis besarnya isu yang terjadi Nganjuk didasarkan pada isu Money Politic yang dilakukan oleh pasangan Taufiqurrahman-Abdul Wahid Badrus.

Fenomena pilkada yang terjadi di Maluku Utara maupun di kabupaten Nganjuk sebenarnya mengindikasikan bahwa negara jika diturunkan kelvel yang bawah pemerintah daerah yang diwakili oleh DPRD terkategori dalam label lemah. Kelemahan-kelemahan yang sangat elementer adalah tidak mampu mengontrol berbagai bentuk permasalahan-permasalahan yang kemudian berlanjut sampai kepada pertarungan dalam pilkada dan juga pasca pilkada. Dari beberapa pilkada yang baru saja berlangsung tersebut setidaknya kita dapat melihat celah bahwa negara posisinya sangat lemah untuk mengantisipasi konflik-konflik yang terjadi.

Kasus pilkada yang terjadi di Maluku Utara maupun Pilkada yang terjadi kabupaten Nganjuk sebenarnya merupakan Untaian kecil dari beberapa kelemahan negara untuk menyediakan *Political goods* khususnya seperti keamanan dalam pilkada, proses berjalannya demokrasi yang baik ditingkat lokal maupun sebagainya. Dari beberapa pilkada yang telah dilakukan dimulai tahun 2005 telah banyak terjadi kelemahan-kelemahan negara dalam menyelenggarakan proses pilkada.

Selain kelemahan-kelemahan seperti apa yang terjadi di atas sebenarnya kelemahan negara yang paling elementer bisa dilacak dimulai dari segi penyelenggaraan pilkada. Persiapan pilkada seperti penyediaan bahan logistik (kotak suara, tinta, kertas pemilih) penyediaan anggaran untuk pilkada menjadi tolak ukur dimana sebuah negara sukses dalam

melaksanakan sebuah even pilkada. Akan tetapi dari beberapa penyelenggaraan pilkada yang telah ditemukan masih ditemukan beberapa kasus yang mengindikasikan bahwa negara belum mampu memberikan pelayanan yang baik. Dan berikut ini adalah beberapa permasalahan yang elementer dari kelemahan negara dalam penyelenggaraan pilkada di beberapa provinsi.

Indikator Lemahnya Negara dalam Penyelenggaraan Pilkada

Daerah Pilkada	Kasus	Deskripsi
Kediri	Hilangnya Bahan Logistik dan kurangnya bahan logistik	Ribuan kotak suara hilang
Makassar	Penundaan Pilkada	Pilkada Sulsel terancam ditunda disebabkan karena keterlibatan PNS dalam Pilkada masih menjadi polemik
Palembang	-Pilkada Memakai dana Talangan -Pendataan Para Pemilih	Dana Pilkada yang belum turun. Data Pemilih yang belum terselesaikan
Jakarta	Penggadaan Bahan Logistik Pilkada	Penyaluran Bahan logistik belum tersebar
Dumai	Data Pemilih	Data base Pemilih belum terkumpulkan
Depok	Data Pemilih Yang Amburadul	Data pemilih banyak tidak akurat
Kutai Kartanegara	Anggaran Pilkada	KPU Kutai Kartanegara Meminjam Uang untuk pembelian Bahan Logistik.
Situbondo	Anggaran Pilkada	KPUD Situbondo harus meminjam untuk pembelian bahan logistik.
Jambi	Kartu Pemilih (Siluman) beredar	Banyak nya kartu pemilih yang beredar tanpa sepengetahuan
Depok	Permasalahan HUKUM	Sistem Peradilan yang tidak independen dalam memutuskan perkara contoh kasus Nurmahmudi Ismail.

Sumber diolah dari www.cetro.or.id: sumber ini berupa kumpulan dari beberapa PILKADA yang telah dilakukan sepanjang tahun 2005.

Ternyata kelemahan-kelemahan yang terjadi pada tahun 2005 mengenai kelemahan-kelemahan elementer sepertinya akan berlanjut terus. Setidaknya KPU ataupun KPUD sebagai institusi yang dibentuk oleh pemerintah belum juga menampakkan signifikansi dalam memberikan pelayanan yang mumpuni dalam penyelenggaraan Pilkada. Pada tahun 2007 setidaknya ada beberapa permasalahan yang semakin mengindikasikan bahwa negara belum mampu untuk memberikan secara maksimal. Tahun 2007 setidaknya ada beberapa pilkada tingkat Provinsi yang ditengarai mempunyai banyak permasalahan. Diantara pilkada yang mempunyai permasalahan dalam masalah pemilihan adalah, Pilkada

DKI, Pilkada Maluku Utara, Pilkada Sulawesi Selatan, Pilkada Kalimantan Barat, Pilkada Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Dari beberapa permasalahan yang muncul dari beberapa pilkada yang tertera tersebut merupakan permasalahan yang cukup fundamental yakni permasalahan pendataan para pemilih, dimana tidak ada sinkronisasi dari BPS setempat dengan KPU Provinsi Sebagai penyelenggara pilkada.

Pada akhirnya pilkada yang masih diselimuti oleh ketidak pastian data pemilih berjalan dengan lancar, walaupun satu pilkada yang masih dalam tanda tanya yang sangat besar, yakni Pilkada yang diselenggarakan di Maluku Utara. Hingga sampai saat ini tanggal 6 April 2008 daerah tersebut belum menetapkan pemimpin daerah tersebut.

Selain persoalan Logistik, Persoalan yang lain menjadi titik awalnya konflik yang semakin menyudutkan para penyelenggara pilkada adalah masalah pendaftaran pemilih. Ikut sertanya seorang dalam pemilih jika kita mengikuti alur berfikirnya Juan Linz maka persyaratan keikutsertaan peserta pemilih memiliki arti yang sangat penting untuk menuju kearah demokratisasi, karena yang menjadi esensi dari ini dimana peserta pemilih memiliki hak untuk untuk menentukan referensi pilihan politiknya.

Disetiap pilkada yang diselenggarakan persoalan pendataan pemilih sering menimbulkan beragam persoalan. Konflik-konflik yang mengarah kepada kekerasan, kerusakan massal, persinggungan etnis dan agama muncul justru sering dipicu dari permasalahan ini.

2. Lemahnya KPUD Sebagai institusi Penyelenggara Pilkada

KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) yang ditelah dibentuk oleh pemerintah dibawah kordinasi dari Komisi Pemilihan Umum Pusat

ternyata sering bersinggungan dengan beberapa institusi pemerintahan daerah. Apa yang terjadi di Tuban beberapa tahun yang lalu, kemudian disusul dengan pilkada yang terjadi di Depok, dan yang terakhir persengketaan hasil di Maluku Utara merupakan segelumit kisah dibalik penyelenggaraan pilkada yang berjalan dengan meninggalkan berbagai macam persoalan. Ketidak mampuan KPUD dalam menyelesaikan sengketa pasca pilkada dan Ambiguitas posisi KPUD yang tidak netral menjadikan KPUD sebagai Even Organizer Politik yang dilakukan oleh elit-elit politik ditingkat lokal.

Idealnya setiap penyelenggaraan pilkada harus tetap dilaksanakan dengan menjunjung sifat-sifat Independen dan terlepas dari intervensi dari manuver-manuver politik, baik manuver yang berasal dari tingkat pusat maupun manuver politik dari tingkat lokal. Hal ini dikarenakan KPUD sebagai insitisi penyelenggara pilkada diharapkan mampu menjadi penjaga gawang demokrasi ditingkat lokal. Akan tetapi fenomena yang sedang berjalan dilapangan sangat berbeda dengan apa yang menjadi imajinasi oleh setiap orang.

UU Otonomi Daerah No 32 tahun 2004 memberikan kewenangan penuh kepada KPUD baik ditingkat Provinsi mamupun ditingkat lokal untuk menyelenggarakan Pilkada. Jika ditelisik lebih jauh lagi maka, hasil pebelitian yang dilakukan oleh CETRO (*Centre for Elctoral Reform*) menyebutkan bahwa kewenangan tersebut meninggalkan beberapa permasalahan yang sering melanda pada pelaksanaan pilkada. Diantara permasalahan yang muncul adalah tingkat korupsi yang terjadi ditingkat

lokal. Dan berikut ini adalah inpentirisasi dari Cetro mengenai permasalahan yang melanda KPUD dalam penyelenggaraan pilkada.¹⁷

- 2.a. Adanya Kooptasi DPRD yang menyangkut masalah anggaran, mau dalam pertanggung jawaban.
- 2.b. Lemahnya Standar-standar ketentuan umum seperti yang tertera dalam UU NO 12/2003 yang meliputi aspek-aspek Transparansi, Prinsip Tepat Waktu, Prinsip Hemat Anggaran, Apek Kualitas, Aspek keamanan.
- 2.c. Walaupun KPUD bertanggung jawab terhadap DPRD masih sangat terbuka kemungkinan terlibat KKN, seperti adanya persekutuan yang menyangkut aspek pencalonan kepala daerah.
- 2.d. Independensi anggota KPUD masih perlu kita pertanyakan. Pantauan dari Cetro menyebutkan bahwa samapai sekarang ini masih banyak KPUD yang terlibat dengan pelanggaran pidana dan administratif pada pelaksanaan pilkada.

Selain beberapa permasalahan diatas yang menjadi polemik yang berkepanjangan di KPUD adalah ketiadaan kendali pusat oleh KPU seperti apa yang tertera pada UU NO 32/2004 yang mengatakan bahwa KPU hanya memberikan masalah teknis kepada KPUD dalam penyelenggaraan Pilkada, sehingga intruksi permasalahan teknis pun sangat minimal dirasakan, karena pihak KPU sendiripun sering terlibat dalam permasalahan pribadi seperti terjerat dalam korupsi bahan logistik, scandal tender pengadaan bahan logistik ataupun lain sebagainya.¹⁸ Disisi lain KPUD juga sangat lemah untuk melakukan

¹⁷ Lihat Cetro (Centre for Electoral Reform) "*Urgensi Revisi UU NO.32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebelum Penyelenggaraan Pilkada*" dalam hal ini Cetro menyebutkan beberapa kelemahan yang terjadi ketika pelaksanaan pilkada sehingga meimbulkan tindakan-tindakan yang bersifat KKN.

¹⁸ Muhammad Qadari "*Ranjau-ranjau Pilkada*" yang dibersumber dari www.telpengda.banjarnegarakab.go.id

kontroling yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait, seperti Panwaslu ketika proses pilkada berlangsung.

Beberapa titik-titik krusial yang dialami oleh Panwaslu adalah adanya Indikasi *Pertama Money Politic* (Politik Uang) yang dilancarkan oleh beberapa kandidat untuk merayu para pemilih. Ketika pilkada berlangsung proses ini seperti proses ini lepas dari jangkauan pihak Panwaslu. *Kedua* adalah adanya Intimidasi yang melibatkan bara preman dalam hal pencoblosan, hal ini sebenarnya sangat membahayakan bagi proses demokrasi akan tetapi realita yang ada dilapangan menunjukkan bahwa jika hal ini terjadi pihak-pihak yang terkait seperti, KPUD maupun Panwaslu kerap mengabaikannya. *Ketiga* adalah Pencurian Start Kampanye. Pencurian Start kampanye ini sering dilakukan oleh pihak-pihak yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, sayangnya jika pencurian ini didapati, maka punisemen yang diberikan kepada pihak yang melakukan masih kurang memberikan efek jera untuk kemudian hari dan penyelesaian kasusnyaapun biasanya tidak terpublikasikan. *Keempat* adalah Kampanye Negatif ketika saat pencoblosan sering terjadi dengan cara menjelek-jelekkan para kandidat yang lain. Dari beberapa kasus diatas sebenarnya memberikan gambaran bagaimana KPUD yang diikuti oleh Panwaslu sangat lemah untuk melakukan kontrol terhadap jalannya pilkada yang demokratis.

Tentu saja KPUD bukan semata-mata menjadi pengkambinghitaman terhadap berbagai permasalahan yang muncul terhadap persoalan yang muncul dalam pilkada. Akan tetapi beberapa untaian diatas sebenarnya indikasi bahwa instansi penyelenggara pilkada seperti KPUD masih jauh dari harapan jika dihadapkan pada permasalahan *Political Goods*. Ketidakmampuan KPUD untuk

menyelenggarakan pilkada dengan mematuhi rambu-rambu demokrasi akhirnya dimanfaatkan sebagian partai politik ataupun elit-elit politik tertentu atau KPUD disetir oleh DPRD yang mengakibatkan terjadinya simbiosis mutualisme politik sehingga anggapan bahwa KPUD sebagai *Even Organizer Politik* pun mencuat kepermukaan. Jadi tidaklah salah sebagaimana orang mengatakan bahwa KPUD sebagai penyelenggara akan tetapi alur permainannya telah dimanipulasi beberapa kalangan, dan tampaknya pemerintah sebagai otoritas tertinggi belum menyentuh kepada persoalan tersebut.

3. Lemahnya Negara Untuk Mengatasi Berbagai Konflik dalam Pilkada.

Demokrasi dalam tingkatan lokal telah melahirkan beberapa perubahan yang mendasar bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dampak yang langsung dirasakan adalah telah berlangsungnya beberapa Pilkada yang telah terjadi diseluruh bangsa ini. Semangat desentralisasi yang kini menggebu-gebu tampaknya menninggalakan beberapa persoalan, yakni munculnya beberapa konflik yang terjadi disetiap daerah.

Tindakan kekerasan ataupun konflik yang terjadi pada masa-masa pilkada memang menjadi hiasan di televisi atau menjadi pemberitaan di media massa. Konflik-konflik yang terjadi tentu saja menimbulkan implikasi yang panjang sehingga meninggalkan berbagai persoalan sehingga berimplikasi terhadap stabilitas pemerintahan daerah.

Seperti yang di ungkapkan Peter Meir yang dikutip oleh I Ketut Putra Erawan¹⁹ maka konflik akan muncul di daerah yang didominasi oleh kekuatan yang berbeda. Akan tetapi pakar seperti Antony Downs

¹⁹ I Ketut Putra Erawan *"Kekuatan Politik dan Konflik : Kajian Teoritis"* Pemilu 2004 Transisi Demokrasi dan Kekerasan CSPA BOOKS 2004.

mengatakan bahwa konflik bisa terjadi bila disuatu daerah itu didominasi oleh kekuatan-kekuatan sejenis (se-ideologi) atau kekuatan yang jarak ideologisnya tidak terlalu jauh. Alasannya adalah karena kekuatan-kekuatan sedang memperebutkan pasar pemilih yang sama.

Jika ditelisik lebih jauh mengenai penyebab konflik yang terjadi pada masa pilkada dapat dikategorisasikan beberapa tahap. *Pertama*, masalah Independensi KPUD, karena banyak orang mengatakan bahwa Ada keberpihakan KPUD terhadap pasangan calon tertentu. *Kedua* adalah kekecewaan terhadap para kandidat yang kalah dalam persaingan pilkada. Kadangkala elit politik belum mampu menghargai hasil demokrasi dan tampaknya demokrasi hanya menjadi milik pemenang dan bukan kepada pihak yang kalah. Sedangkan yang *ketiga* adalah Munculnya semangat fanatisme yang berlebihan yang dikaitkan terhadap etnis ataupun dirangkai kedalam masalah religiusitas. Sosok figur yang menjadi alasan dalam perilaku pemilih kerap menjadi persoalan yang rumit ketika pilkada tidak memberikan hasil yang baik. Pilkada di Tuban beberapa tahun yang lalu maupun di Maluku Utara tahun 2007 setidaknya mengindikasikan bahwa kerusuhan tersebut bermuara pada tiga aspek diatas.

Dari beberapa penyebab konflik diatas,sebenarnya konflik-konflik yang muncul dalam pilkada,selalu bermuara kepada beberapa apek. *Pertama*, konflik selau diikuti dengan sentimen etnisitas yang berlebihan, yang dirangkai dengan Politik Identitas di daerah. *Kedua*, Permasalahan Agama, diberbagai daerah agama merupakan sarana empuk dijadikan black campagne. sedangkan yang terakhir adalah permasalahan isu-isu keputra daerahan.

Konstestasi Politik dalam pilkada yang ada di Indonesia memang memiliki banyak persoalan. Etnis yang beragam dan religiusitas yang juga beragam semakin memudahkan untuk mempolarisasikan basis-basis massa pendukungnya. Kajian bagaimana etnis tertentu menentukan pilihan politiknya sebenarnya telah banyak mendapatkan perhatian. Kata kunci yang dapat cermati adalah bagaimana etnis tersebut mampu dimobilisasi oleh suatu parpol atau suatu organisasi tertentu. Untuk melihat bagaimana etnis itu bermain dalam ranah politik khusus dalam pilkada ada baiknya kita melihat apa yang dipaparkan oleh Cohen yang Mengatakan bahwa:

*Etnicity is essentially a political Phenomeon, as traditional customs are used only idioms, and as mechanism for political alignment. Another tribal group may unite in order to mobilize votes in election, to gain new benefits in development funds.*²⁰
(Esensi dari etnis merupakan sebuah perwujudan dari politik, selain mengandung nilai-nilai tradisional yang menggunakan corak-corak tertentu, etnis juga merupakan sebagai mekanisme dari pensejajaran politik. Kelompok suku yang lain mungkin saja untuk bersatu untuk memobilisasi di dalam pemilu, untuk mendapatkan sesuatu keuntungan yang baru).

Keunikan bangsa Indonesia adalah memiliki keanekaragaman dalam hal etnis, agama, budaya dan lain sebagainya. Arena pilkada memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk melakukan hak pilihnya kepada siapa saja tanpa memandang etnis tertentu, ataupun agama tertentu. Jika kita kembali mengikuti aliran pemikiran Juan Linz ataupun Schmitterian, maka adanya kebebasan setiap orang untuk memiliki hak tertentu untuk menentukan referensi politik merupakan sebuah jalan kearah demokratisasi di tingkat lokal.

Namun kita tidak bisa memungkiri bahwa setiap ajang dalam pilkada persaingan untuk memobilisasi massa dari kalangan etnis tertentu

²⁰ Abner Cohen "Etnicity and Politics" Oxford University Press, 1996, hal 83

ataupun dari agama tertentu sering menaikkan tensi persaingan dalam pilkada. Bahkan persaingan tersebut tidak jarang menimbulkan konflik-konflik yang bersifat komunal. Bagi teori konflik hal ini dianggap sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan, (*Perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi-aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai.²¹ Yang menjadi perhatian kita adalah sering muncul konflik yang berbau etnis maupun agama merembet ke dalam berbagai sisi. Ironisnya negara kurang tanggap untuk menyediakan public goods sebagai bagian dari *Politic goods* seperti adanya public sphere untuk mengcover atau meminimize potensi-potensi konflik yang akan muncul setelah pilkada berlalu, karena pada umumnya pasca pilkadalah sering terjadi konflik ini akan bermunculan yang dirangkai oleh beragam isu seperti etnis apa yang menang, ataupun agama mana yang menang.

Pilkada yang diselenggarakan disetiap daerah mau tidak mau sering menjadi ajang kontestasi dalam hal politik identitas. Keidentitasan ini yang nantinya akan memicu sebuah aroma persaingan yang sering dibungkus oleh kebanyakan partai politik. Ubed abdillah²² mengatakan bahwa Politik Identitas adalah nama lain dari biopolitik dan politik perbedaan dan Kemunculan politik etnis diawali oleh tumbuhnya kesadaran yang mengidentifikasikan mereka dalam suatu golongan atau kelompok etnis tertentu. Kesadaran ini kemudian memunculkan solidaritas kekelompokan dan kebangsaan. Politik identitas mengacu

²¹ Dean G Pruit dan Jeffrey Z Rubin. "*Teori Konflik Sosial*", Pustaka Pelajar 2004.

²² Ubed Abdillah "*Politik Identitas Etnis, Pergulatan Tanda tanpa Batas Identitas*", Tera Magelang, 2002.

kepada politik etnis yang mempunyai tujuan tertentu sesuai apa yang dibutuhkan oleh kelompok etnis-etnis yang bermain dalam ranah politik.

Persolaan dalam pilkada yang selalu membawa konflik khususnya konflik etnis bisa dikatakan hanya memiliki satu pemicu yang mungkin berlaku untuk semua daerah di Indonesia. Yakni permasalahan “*siapa*” yang berhak untuk menjadi pemimpin di daerah. Lahirnya sifat seperti ini bisa dikatakan sebagai efek domino dari proses otonomi daerah yang selalu mengusug isu keputra daerahan. Maka politik etnik dapat dibangkitkan oleh ketidak puasan kelompok anggota masyarakat yang terkonsentrasi dalam suatu daerah, yang menuntut ekonomi lebih besar atas kediaman mereka, atau perwakilan yang lebih memadai pada pemerintah pusat ataupun juga oleh kelompok-kelompok pendatang yang hendak menginginkan akses lebih memadai dalam pembuatan keputusan yang terkadang dikombinasi dengan oleh tuntutan pengakuan dan dukungan pemerintah terhadap institusi budayanya.

Dari beberapa daerah terdapat titik-titik rawan dalam pelaksanaan pilkada, khususnya yang memiliki ragam etnis. Sumatera Utara, yang melaksanakan Pilkada pada bulan April 2008 disinyalir memiliki potensi untuk munculnya konflik tersebut. Di kota Medan, sebenarnya tidak ada suku bangsa yang dominan. Etnis Cina merupakan etnis ketiga yang paling besar setelah etnis Batak, etnis Batak sekitar 33,28% yang terbagi ke dalam varian-varian Batak, seperti Batak Karo (4,10%), Batak Pakpak (0,34%), Simalungun (0,69%), Mandailing (9,36%), Tapanuli (19,21%), sedangkan Etnis Jawa (33,03%) dan menurut data BPS untuk tahun 2000 jumlah etnis Tionghoa sudah mencapai 10,65% dari total penduduk medan atau sekitar 203 ribu jiwa, sedangkan etnis minang

8,60%, melayu 6,59, Aceh 2,78.²³. Selain Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Bangka Belitung yang memiliki ragam etnis. Dari hasil pantauan LSI maka di beberapa daerah seperti Kalimantan Barat faktor etnis tampak memainkan peranan yang sangat penting dimana para pemilih cenderung memilih kandidat yang berasal dari etnis yang sama. Beberapa daerah tersebut merupakan beberapa daerah yang termasuk pada fase-fase rawan konflik. Dan bagi penulis panorama seperti ini sangat jarang untuk ditindak lanjuti bagaimana untuk menciptakan sebuah pilkada yang berjalan secara demokratis.

Beberapa Konflik Pilkada Yang Disertai Dengan Beberapa Kekerasan

Daerah Pilkada	Kasus	Bentuk Konflik
Tuban	Adanya Kecurangan dalam kertas suara	Pengrusakan terhadap instansi pemerintah, dan pembakaran rumah calon Bupati Tuban
Maluku Utara	Adanya Indikasi Kecurangan dan Money Politics.	Pengrusakan kantor KPUD
Gowa	Adanya Indikasi kecurangan	Amuk Massa
Dompu	Salah satu pasangan dari etnis tertentu merasa dirugikan Adanya Isu Money Politic	Amuk Massa
Ambon	Salah Satu bupati Seram tidak lolos dalam verifikasi pencalonan	Massa dari kalangan tertentu Akhirnya menduduki Kantor Gubernur Maluku
Nganjuk	Moneys Politic	Massa pendukung melakukan aksi brutal kepada KPUD
Binjai	Adanya isu Money Politics	Bentrok Massa
Labuhan Batu	Isu Putra Daerah	Tiap-tiap kandidat mengusung tema etnis, bentrok fisik antar etnis tidak terjadi nehitu besar, akan tetapi gesekan antra Putra Jawa dengan Putra Batak kental Terasa

Diolah dari berbagai sumber ; Waspada, Suara Karya, Kompas, Media Indonesia

Jika kita kembali mengacu seperti apa yang dikatakan oleh Robert I Rotberg maka salah satu indikator negara lemah *weak State* sering munculnya konflik-konflik etnis khususnya dalam perebutan kekuasaan. Kondisi negara yang tidak memiliki pengelolaan sumber-

²³ *Ibid*

sumber konflik yang tersusun rapi ketika even pilkada ini berlangsung akan menyebabkan posisi negara sangat lemah.

KESIMPULAN

Political Goods ada sebuah pelayanan dari negara untuk memfasilitasi apa yang sudah menjadi kebutuhan masyarakatnya. Pilkada merupakan sebuah even dimana negara juga harus mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap penyelenggaraannya sekaligus bertanggung jawab atas efektifitas dari hasil pilkada tersebut. Akan tetapi dari berbagai permasalahan-permasalahan yang sering terjadi baik yang meimbulkan konflik vertikal maupun konflik horizontal sering melemahkan posisi dari negara selaku pengambilan kebijakan

Ketika negara mempunyai pola yang sistematis untuk menyediakan pelayanan bagi publiknya akan tetapi tidak mampu untuk mengelolanya, maka negara tersebut bisa dikatakan labelkan ke dalam label *weak state*. Sering orang terjebak ketika melabelkan sesuatu negara dan perbedaan yang tipis antara negara lemah (*weak state*) dengan *Failed States* sering mengaburkan perbedaan itu. Ketika negara tidak mempunyai kemampuan apa-apa dalam memberikan *political goods* maka hal itu disebut *failed states*.

Sesungguhnya pilkada yang telah berlangsung dinegeri ini sungguh sangat mengerikan. Keragaman etnis, agama, serta multikulturasi politik sering menjadi ancaman di dalam negara. Disatu sisi pilkada menjadi sebuah indikator terhadap penerapan tata cara berdemokrasi, dilain pihak pilkada sering menyulut berbagai macam persoalan yang kadang kala menimbulkan konflik yang serius dimana dapat mengancam stabilitas negara.

Kelemahan Negara Dalam Pilkada seperti apa yang telah dipaparkan di atas sebenarnya beberapa kelemahan yang paling elementer dimana pengelolaannya masih amburadul. Ada beberapa Persoalan yang sering terjadi adalah *Pertama* masalah Anggaran, dimana negara sering kelabakan untuk menyediakan dana dalam penyelenggaraan pilkada. Setiap daerah yang melakukan pilkada dengan melakukan dana talangan semakin menunjukkan bahwa negara tersebut lemah dalam penyediaan hak-hak politik. *Kedua* adalah masalah Bahan Logistik yang meliputi kotak Suara, Tinta, dan juga Surat Pemilih. Sering terjadi polemik seperti kekurangan bahan logistik menjadi pemicu konflik selain pendataan bagi para pemilih. *Ketiga* adalah Hegemoni Parpol yang dapat kita lihat pasca pilkada yang sering melemahkan posisi negara, koalisi yang sering dibangun oleh parpol sering menguntungkan pihak-pihak tertentu saja, yang mengakibatkan negara sering *uncontrol* terhadap kebijakan daerah. sedangkan yang *Keempat* adalah Munculnya konflik yang berbau etnisitas-religius pra ataupun pilkada. Negara tidak mempunyai sistem *Good Governance dalam Managemen Conflic Politics*. Ketika konflik-konflik itu bermunculan maka penggunaan alat-alat penekan negara seperti Polisi, Militer menjadi ujung tombak yang terkahir untuk menyelesaikan masalah. Cara-cara adat yang sering dipakai oleh negara sering tidak *competible* dengan realitas politik yang sedang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah,Ubed.2002. *“Politik Identitas Etnis, Pergulatan Tanda tanpa Batas Identitas”*, Tera Magelang.
- Cohen ,Abner.1996. *“Ethnicity and Politics”*, Oxford University Press.
- Gaffar,Afan,1999. *“Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi”*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Lay,Corbelis,2008. *“Memahami Indonesia Dari Daerah”* dalam sebuah paper untuk mereview Buku Politik Lokal Indonesia, JIP-S2 PLOD, UGM.
- Martantanto,Ucuk, 2007. *“Kemiskinan di Daerah”*, Potret Buram Desentralisasi, Mandatory Politik Kesejahteraan di tanah Republik.
- Octafiani etal, 2007. *“Pemekaran Daerah: Politik Identitas, Elitisme dan Integrasi Nasional”*, sebuah kumpulan tugas Politik Lokal/Politik Desentralisasi. UGM Yogyakarta.
- O’Donnell,Guillermo dan Phlippe C Schmitter, 1993. *“Transisi Menuju Demokrasi :Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian”*, Jakarta:LP3ES.
- Pratikno dan Cornelis lay,2007 *“Alternatif terhadap Perspektif Pluralisme”* dalam sebuah diktat perkuliahan Politik Indonesia.
- Prihatmoko,J, Joko, 2005. *“Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia”*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Pruit,G Dean dan Jeffrey Z Rubin.2004”Teori Konflik Sosial. Pustaka Pelajar.
- Rotberg,I Robert, 2002. *“The New Nature of Nation-State Failure”*, The Washington Quarterly, Vol 25.
- Rotberg,I Robert ,2007. *“Failed States, Collapsed States, Weak States: Cause and Indicators”*, Sebuah Materi Perkuliahan Ilmu Politik UGM.
- Sahdan,Gregorius,2002, *“Distorsi dan Paradoks Demokrasi dalam Pilkada”*, dalam sebuah buku Demokrasi Lokal ala Pilkada, APMD Press, Yogyakarta.

Yunanto Eko,Sutoro. “*Pendalaman Demokrasi Lokal Melalui Masyarakat Sipil*”, Sebuah Rancangan Penelitian diajukan untuk memenuhi persyaratan Lamaran Program Doktor program Ilmu Politik, UGM.

Jurnal Penelitian

LSI sebuah Edisi kajian *Pilkada dan Pemerintahan yang Terbelah Devided Government*: edisi 7 N0vember 2007.

Situs Internet

Perincian dari permasalahan yang diungkapkan dari Majalah *The Washington Quarterly* (Amerika), merilis negara-negara yang tidak mampu memberikan *political goods* terhadap rakyatnya. Sumber ini berasal dari www.polarhome.com

Background Notes On The Notion of Weak State as Employed In International Relations Studies, Overcoming State Weakness: An Agenda for State Reform eastern Europe Conference. Sumber didownload dari www.web.ceu.hu.com

www.jppr.or.id

www.cetro.or.id

Surat Kabar

Waspada
Suara Karya
Media Indonesia
Kompas

THE
Character Building
UNIVERSITY